

Peran Strategis Indonesia di Samudra Hindia dalam Dinamika Geopolitik Regional

Khumar Shubham^{1*}, Risa Amalia Kurniawati², Sri Ratna Sari³, Rizky Arfiyanto⁴,
Bambang Syaeful Hadi⁴, Gunawan Santoso⁵

^{1,2,3,4}Universitas Negeri Yogyakarta

⁵Universitas Muhamamdiyah Jakarta

*Corresponding email: khumarshubham.2023@student.uny.ac.id

Abstrak – Samudera Hindia memiliki peran strategis dalam geopolitik regional, terutama sebagai jalur perdagangan dunia dan sumber daya alam yang kaya. Indonesia, dengan posisi geografisnya yang strategis, memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Artikel ini mengulas peran Indonesia dalam keamanan maritim, kerja sama regional melalui forum seperti *Indian Ocean Rim Association* (IORA), dan tantangan yang dihadapi, termasuk ancaman transnasional seperti perompakan, perdagangan manusia, dan degradasi lingkungan. Dengan pendekatan diplomasi maritim dan penguatan kapasitas nasional, Indonesia berusaha meningkatkan pengaruhnya sebagai negara maritim. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui analisis literatur kebijakan terkait geopolitik dan keamanan maritim. Hasil analisis menegaskan pentingnya kolaborasi regional untuk mengatasi tantangan di Samudera Hindia serta posisi strategis Indonesia dalam dinamika geopolitik kawasan.

Kata kunci: Geopolitik, Samudera Hindia, Keamanan Maritim, Diplomasi Maritim, Indonesia, IORA, Kerja Sama Regional

Abstract – The Indian Ocean plays a strategic role in regional geopolitics, particularly as a global trade route and a rich source of natural resources. Indonesia, with its strategic geographical position, plays a vital role in maintaining regional stability. This article examines Indonesia's role in maritime security, regional cooperation through forums such as the Indian Ocean Rim Association (IORA), and the challenges faced, including transnational threats such as piracy, human trafficking, and environmental degradation. Through maritime diplomacy and strengthening national capacity, Indonesia seeks to enhance its influence as a maritime nation. This study employs a descriptive qualitative method by analyzing policy literature related to geopolitics and maritime security. The findings highlight the importance of regional collaboration in addressing challenges in the Indian Ocean and Indonesia's strategic position in the region's geopolitical dynamics.

Keywords: Geopolitics, Indian Ocean, Maritime Security, Maritime Diplomacy, Indonesia, IORA, Regional Cooperation

Pendahuluan

Samudera Hindia merupakan lautan yang memiliki sumber daya alam yang menjanjikan bagi pertumbuhan ekonomi negara-negara dari tiga benua, yaitu Asia, Australia dan Afrika dengan luas mencapai 73,3 juta km². Ditinjau dari sudut pandang ekonomi, keberadaan Samudra Hindia sangat strategis. Menurut Adriana Elisabeth, *Focal Poin Indian Ocean Rim Academic Group* (IORAG) beberapa nilai strategis Samudra Hindia adalah menjadi jalur perdagangan dunia, sekitar 50% kapal dagang, 34% lalu lintas kargo, dan 67% pengiriman minyak dunia melewati Samudra Hindia. Selain itu, 55%

cadangan minyak bumi dan 40% gas berada di kawasan ini (Ayuningtyas, 2018). Dengan demikian bahwa potensi geografi Indonesia sangatlah banyak, khususnya letaknya di persimpangan dua Samudra sehingga memiliki pengaruh yang kuat dan besar terhadap dinamika geopolitik di lautan Hindia, hal tersebut dibuktikan dengan adanya keuntungan bagi Negara Indonesia sehingga menjadi kekuatan Geopolitik bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Indonesia memiliki posisi geografis yang strategis antara lain berada diantara dua benua dan dua samudera, menjadi jalur pelayaran laut dunia yang penting yakni memiliki empat dari tujuh jalur pelayaran lalu lintas damai internasional yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Makassar-Lombok dan Selat Ombai-Wetar disamping tiga lainnya yaitu Terusan Suez di Mesir, Terusan Panama serta selat Gibraltar antara Spanyol dan Maroko yang dapat menjadi modal utama kepentingan nasional dan kerja sama regional (Sitohang, J, et al. 2008: 8). Letak geografis serta konfigurasi alamiah NKRI mengharuskan Indonesia memiliki kepentingan yang sangat besar dalam masalah keamanan maritim.

Hal-hal mendasar dalam kaitan ini adalah bahwa NKRI dibentuk oleh 17.448 buah pulau besar dan kecil, berbatasan dengan 10 negara tetangga dan hanya berbatasan darat dengan 3 negara, 3 jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), serta 3 buah *choke points* sebagai jalan masuk dan keluarnya kapal-kapal sebelum dapat berlayar di lautan terbuka. Koridor-koridor maritim tersebut menimbulkan tantangan keamanan mulai dari perompakan hingga sengketa perbatasan untuk Kawasan Samudra Hindia (David Michel, Russel Sticklor 2012:10). Pada dasarnya di era kepemimpinan Joko Widodo pada tahun 2014-2019 ini Indonesia memiliki kepentingan untuk memperbaiki *image* sebagai negara maritim dimata internasional (Santoso, Sabika, et al., 2023). Menjadi negara maritim berindikasi bahwa keamanan maritim atas jalur logistik yang aman dari berbagai hambatan dengan adanya operasi keamanan laut dan kesejahteraan masyarakat pesisir yang mampu mengolah potensi kelautan secara berkelanjutan. Maka dalam pertemuan COM di Padang 2015 dimana Indonesia dikukuhkan sebagai ketua IORA untuk 2 tahun mendatang, Indonesia menghasilkan dokumen Deklarasi Maritim untuk seluruh negara anggota IORA. Deklarasi tersebut sebagai bukti keseriusan Indonesia dalam mengamankan lautnya bersama dengan IORA untuk kawasan Samudera Hindia. Berikut dijelaskan kepentingan Indonesia dalam IORA di tahun 2015 yang berdasar pada kepentingan keamanan maritim baik bersifat konvensional yaitu menghilangkan ancaman perompakan maupun yang bersifat non konvensional seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang mampu mengolah potensi kelautan secara berkelanjutan. (Ayuningtyas, 2018).

Kepentingan Indonesia sebagai penyedia jalur laut karena terdapat berbagai negaranegara besar seperti Tiongkok, India, Amerika dan Australia yang bersaing untuk memperkuat pengaruh mereka di wilayah ini melalui kehadiran militer, kemitraan ekonomi, dan proyek infrastruktur sehingga peranan Indonesia sangat berpengaruh (Santoso, Abdulkarim, et al., 2023). Persoalan perlombaan persenjataan pun cenderung lebih fokus pada berbagai instrument angkatan laut, seperti meningkatnya belanja kapal selam di kawasan, dan keamanan laut, seperti 36 meningkatnya fokus pada kekuatan dan armada penjaga pantai. Contohnya China membangun pangkalan militer Angkatan laut di kepulauan Spratly dengan cara menggusur pemukiman menjadi pangkalan landasan militer sehingga memperkuat kedudukan China di wilayah perbatasan yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Tentu saja, sebagai wilayah strategis, Samudra Hindia menghadapi sejumlah persoalan dan tantangan yang membutuhkan penanganan dan kerja sama serius di antara kalangan masyarakat internasional. *Transnational crimes*,

seperti terorisme, perompakan dan pembajakan, perdagangan manusia, penyelundupan narkoba dan senjata serta pencurian ikan kerap kali terjadi di kawasan Lingkar Samudra Hindia.

Bencana alam, perubahan iklim dan pencemaran laut di Kawasan Samudra Hindia juga semakin mengundang keprihatinan Masyarakat internasional (Santoso et al., 2022). Warga dunia tidak dapat melupakan dahsyatnya dampak kehancuran dari Tsunami Aceh tahun 2004 lalu. Juga masih tergambar jelas di ingatan mengenai peristiwa hilangnya pesawat Malaysia Airlines MH 370 yang berujung pada semakin pentingnya penanganan isu keselamatan dan keamanan transportasi secara bersama (Santoso & Sari, 2019). Bagi Indonesia sendiri, Samudra Hindia memiliki arti penting bagi stabilitas kawasan. Pada *The Shangri-la Dialogue* tahun 2012, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan: “...in the twenty-first century the Indian Ocean will grow in geostrategic importance. We must make sure that the Indian Ocean does not become an area of new strategic contest and rivalry...” Memandang arti penting Samudra Hindia tersebut, sudah sepatutnya negara-negara di kawasan menjalin kerja sama yang saling menguntungkan. Pemanfaatan *platform* organisasi intrakawasan adalah salah satu opsi terbaik yang dapat ditempuh. Dalam kaitan ini, *Indian Ocean Rim Association* (IORA), yang diresmikan di Mauritius pada tanggal 6-7 Maret 1997 dan beranggotakan 20 negara yang terbentang di lingkar Samudra Hindia salah satunya Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif deskriptif* untuk memahami peran strategis lautan hindia dalam geopolitik regional. Sumber data sekunder menggunakan analisis dokumen kebijakan, seperti RPJMN, visi Poros Maritim Dunia, laporan kementerian Jurnal ilmiah, laporan internasional (ASEAN, UN), serta berita terkait. Metode pengumpulan data menggunakan analisis literatur terkait kebijakan dan dinamika geopolitik di Lautan Hindia. Prosedur analisis data menggunakan analisis konten yang membandingkan isi kebijakan pemerintah dengan tren geopolitik regional.

Hasil dan Pembahasan

Gagasan Negara Nusantara/Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) berhasil dikukuhkan setelah lahirnya konvensi PBB tentang hukum laut atau yang lebih dikenal dengan *United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) pada 10 Desember 1982. Proses ratifikasi pun berlangsung tak lama berselang, tepatnya pada tahun 1985 melalui UU Nomor 17 Tahun 1985. Setelah diratifikasi oleh 60 negara dan resmi berlaku pada tahun 1994, UNCLOS mengesahkan tambahan wilayah nasional Indonesia seluas 3,1 juta km² wilayah perairan dan 2,7 juta km² Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).²² Pencapaian tersebut menginspirasi Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999 untuk menetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Indonesia melalui Bakamla dalam peningkatan keamanan laut. Dalam proyeksi tahun 2024, Bakamla RI menegaskan komitmen untuk menjaga keamanan dan keselamatan laut di Indonesia melalui peningkatan nilai Indeks Keamanan Laut (IKL), pembinaan sinergitas aparat penegakkan hukum di laut, dsb. Bakamla RI berupaya keras mencapai tujuan ini dengan

fokus pada sinergitas patroli, pengembangan kekuatan, penguatan fungsi Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum (KKPH), pertukaran informasi, dan kerja sama melalui kerangka ASEAN Coast Guard Forum (ACF). Membangun kekuatan siber untuk meminimalisir ancaman keamanan. Indonesia meningkatkan standard operating procedure internasional kapal. Kerjasama keamanan maritim Indonesia dengan Australia untuk peningkatan keamanan Samudera Hindia. Australia akan menawarkan kerjasama terutama di bidang pertukaran informasi dan intelijen, khususnya menghadapi illegal fishing dan kejahatan transnasional di perairan Indonesia. TNI diundang untuk ikut serta dalam latihanlatihan lebih banyak di Australia.

Peran diplomasi dan kerjasama regional dalam mengatasi tantangan keamanan maritim dan konflik teritorial di Lautan Hindia

Diplomasi dan kerja sama regional memainkan peran penting dalam mengatasi tantangan keamanan maritim dan konflik teritorial di kawasan Samudera Hindia. Kutipan dari dokumen tersebut menyoroti pentingnya kerja sama keamanan sebagai jembatan yang menghubungkan pemahaman berbagai negara mengenai keamanan maritim. Dengan terlibat dalam kerja sama keamanan inklusif, negara-negara dapat berkolaborasi dalam bidang keamanan maritim yang sama meskipun ada kendala geopolitik. Kerja sama keamanan maritim yang efektif memerlukan penetapan spektrum kegiatan keamanan maritim yang inklusif. Dalam konteks Samudera Hindia, dimana wilayah maritim yang diperebutkan seperti Laut Cina Selatan, Laut Cina Timur, dan Samudera Hindia sendiri menimbulkan risiko keamanan, diplomasi dan kerja sama regional menjadi alat penting untuk mengelola tantangan-tantangan ini. Dokumen ini memberikan perhatian pada kompleksitas sengketa maritim di kawasan ini karena kebutuhan keamanan yang berbeda-beda di setiap negara dan pentingnya geostrategis dari wilayah yang diperebutkan. Selain itu, dokumen tersebut membahas semakin besarnya kehadiran aktor-aktor global seperti Tiongkok, Amerika Serikat, dan India di kawasan Samudera Hindia, yang masing-masing memiliki strategi keamanan maritimnya sendiri. Negara-negara ini terlibat dalam aktivitas untuk meningkatkan kemampuan maritim mereka, mengamankan jalur komunikasi laut (SLOCs), dan mengatasi ancaman non-tradisional seperti pembajakan, terorisme maritim, perdagangan ilegal, dan degradasi lingkungan.

Peran Indonesia:

Indonesia memainkan peran penting dalam mendorong keamanan dan stabilitas maritim di kawasan Samudera Hindia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia mempunyai kepentingan dalam menjaga perdamaian dan keamanan di laut. Negara ini mendukung upaya diplomasi dan kerja sama untuk mengatasi tantangan keamanan maritim dan konflik teritorial. Indonesia secara aktif terlibat dalam forum regional dan internasional untuk mendorong kerja sama maritim, termasuk inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran domain maritim dan program peningkatan kapasitas. Indonesia menekankan pentingnya menegakkan hukum internasional, khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), untuk mengatasi sengketa maritim dan memastikan penyelesaian konflik secara damai. Pendekatan negara ini berfokus pada membina kemitraan dan dialog untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan upaya keamanan maritim kolektif di Samudera Hindia. Selain itu, Indonesia adalah pendukung Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dan berpartisipasi aktif dalam ASEAN Regional Forum (ARF) dan mekanisme keamanan regional

lainnya. Melalui platform ini, Indonesia menggarisbawahi pentingnya kerja sama regional dan penyelesaian sengketa secara damai melalui dialog dan keterlibatan.

Peran Tiongkok:

Sikap Tiongkok terhadap keamanan maritim dan sengketa wilayah di kawasan Indo-Pasifik menggarisbawahi penegasan kedaulatan dan kepentingan strategisnya. Negara ini telah memperluas kehadiran angkatan lautnya melalui pembangunan pulau-pulau buatan di Laut Cina Selatan, yang bertujuan untuk meningkatkan pengaruh maritim dan akses terhadap sumber daya alam. Meskipun menghadapi peningkatan aktivitas patroli laut dan penjaga pantai oleh negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina, Tiongkok terus melanjutkan aktivitas maritimnya di wilayah tersebut. Selain itu, dengan “two-ocean strategy”, Tiongkok berupaya memperluas operasi angkatan lautnya hingga ke Samudera Hindia, yang mencerminkan ambisinya untuk memproyeksikan kekuatan angkatan laut di luar Laut Tiongkok Timur dan Selatan. Perluasan ini bertujuan untuk melindungi aset maritimnya dan mengamankan jalur komunikasi laut. Selain itu, strategi Tiongkok mencakup pengembangan konsep A2/AD (antiaccess/area denial), yang melibatkan serangan pencegahan jarak jauh di Samudera Pasifik Barat, serta Armada Laut Selatan PLAN (People's Liberation Army Navy) yang dilengkapi dengan senjata anti-akses/penolakan area. dengan kapal perusak anti-pesawat untuk melindungi sistem pertahanan udara. Strategi ini dirancang untuk melindungi wilayah Tiongkok selama masa perang dan mengamankan jalur komunikasi laut untuk tujuan ekonomi selama masa damai.

Peran India:

Sikap India terhadap keamanan maritim dan sengketa wilayah di Samudera Hindia dan kawasan Indo-Pasifik yang lebih luas mencerminkan komitmen India untuk meningkatkan keterlibatan strategisnya dan memastikan perlindungan jalur komunikasi laut (SLOCs). Berikut adalah poin-poin penting tentang sikap India berdasarkan informasi yang diberikan:

- Kebijakan Bertindak ke Timur (India's Act East policy), yang diprakarsai oleh Perdana Menteri Narendra Modi, menekankan peningkatan keterlibatan India melalui kemitraan strategis di kawasan Indo-Pasifik. Kebijakan ini menggarisbawahi komitmen India untuk melindungi SLOC di Samudera Hindia demi kepentingan semua negara pesisir.
- Strategi Keamanan Maritim: India, dalam makalah strategi keamanan maritimnya tahun 2015, “Memastikan Laut yang Aman,” memberikan penekanan yang kuat pada kekuatan angkatan laut untuk mengendalikan SLOC dan titik-titik tersedak di Samudera Hindia. India berupaya bekerja sama dengan negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Indonesia, yang dianggap sebagai kekuatan maritim, untuk mencapai tujuan ini.
- Keterlibatan Regional: India telah memperluas keterlibatan strategisnya mulai dari hubungan ekonomi hingga keamanan di negara-negara Asia Tenggara dan Timur. Negara ini secara aktif berkolaborasi dengan Amerika Serikat, Jepang, Australia, dan Indonesia untuk mengatasi masalah keamanan maritim bersama.
- Menangkal Ekspansi Maritim Tiongkok: Kekhawatiran utama India di Samudera Hindia adalah ekspansi maritim Tiongkok. India terlibat dalam upaya untuk menekan pengaruh maritim Tiongkok di wilayah tersebut. Hal ini termasuk menyediakan peralatan angkatan laut ke Vietnam, berpartisipasi dalam platform militer multilateral, seperti Latihan MILAN, dan memperkuat kemitraan maritim dengan Jepang.
- Hubungan Keamanan Segi Empat (Quadrilateral Security Relation): Dalam upaya membendung ketegangan maritim Tiongkok di Laut Cina Selatan, India, bersama Amerika Serikat, Australia, dan Jepang, telah mengadakan diskusi yang mengindikasikan pembentukan hubungan keamanan segi empat di Indo-Pasifik. Sikap diplomatik dan keterlibatan strategis India, termasuk pengaturan

keamanan trilateral dan segi empat, mencerminkan upaya India untuk mengatasi masalah keamanan maritim dan menyeimbangkan ketegasan Tiongkok di kawasan.

Mengintegrasikan kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional dengan potensi geografisnya untuk mencapai tujuan geopolitik di Lautan Hindia, Indonesia dapat mengambil beberapa langkah strategis:

a. Pengembangan Diplomasi Maritim dan Ikut Serta Dalam Forum Regional

Diplomasi maritim melibatkan upaya diplomatik untuk membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara di sekitar Lautan Hindia baik secara bilateral maupun melalui forum multilateral seperti ASEAN atau *Indian Ocean Rim Association* (IORA). Selain itu, termasuk pertukaran kunjungan tingkat tinggi, dialog keamanan maritim, dan penandatanganan perjanjian kerja sama. Indonesia dapat menekankan pentingnya prinsip-prinsip keadilan maritim, kebebasan navigasi, dan keamanan laut dalam diplomasi ini. Ada beberapa komponen dari kerja sama bilateral diplomasi pertahanan ini yang terkait langsung dengan aspek maritim dan sebagian besar terfokus dengan beberapa negara tertentu dan cenderung berkisar pada kegiatan tertentu pula.

b. Penegakan Hukum Maritim dan Kerja Sama Pertahanan Regional

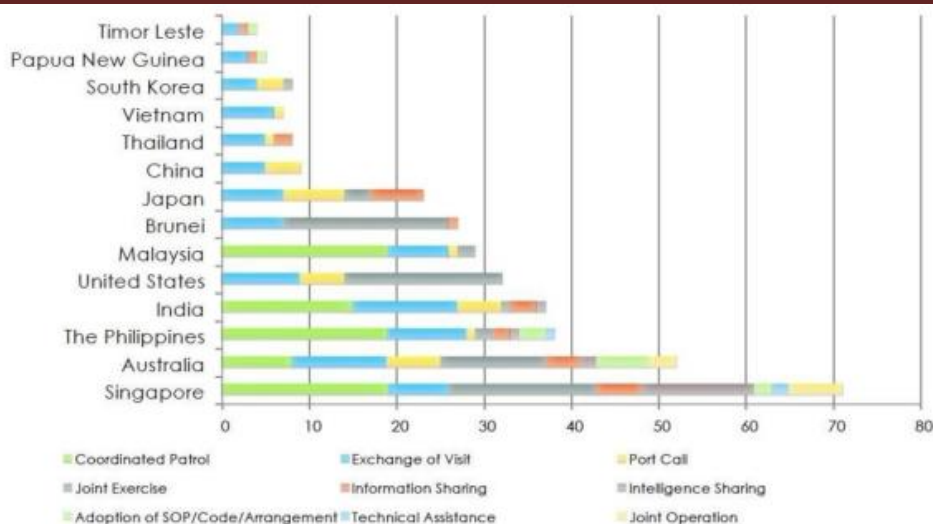
Indonesia dapat memperkuat kerja sama pertahanan regional dengan negara-negara di sekitar Lautan Hindia. Ini meliputi menempatkan lebih banyak sumber daya untuk patroli laut, pengawasan udara, pertukaran informasi intelijen, pembangunan kapasitas pertahanan bersama, dan pelatihan bersama dalam penanggulangan kegiatan ilegal seperti pencurian ikan, perdagangan manusia, dan narkoba di perairan Lautan Hindia.

c. Pemanfaatan Pulau-pulau Strategis

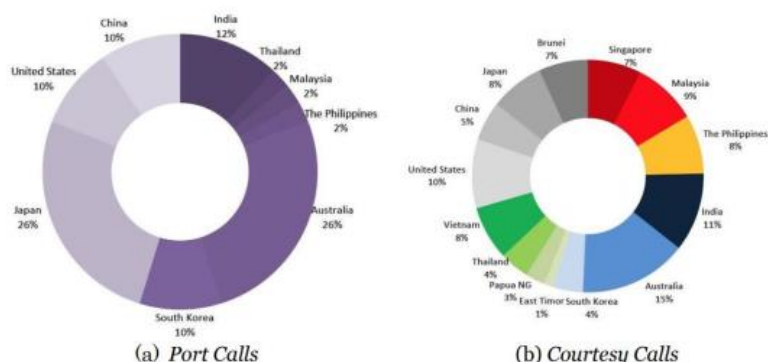
Indonesia dapat menggunakan pulau-pulau strategisnya di sekitar Lautan Hindia sebagai basis untuk kegiatan pertahanan dan pengawasan maritim. Pembangunan infrastruktur di pulau-pulau ini, termasuk pangkalan angkatan laut dan pos pengamatan, dapat meningkatkan kemampuan Indonesia untuk memantau dan merespons aktivitas yang mencurigakan di wilayahnya. Hal ini akan memungkinkan Indonesia untuk lebih efektif mengawasi dan mengamankan jalur pelayaran penting serta area strategis lainnya di Lautan Hindia.

d. Promosi Kesejahteraan Ekonomi Maritim

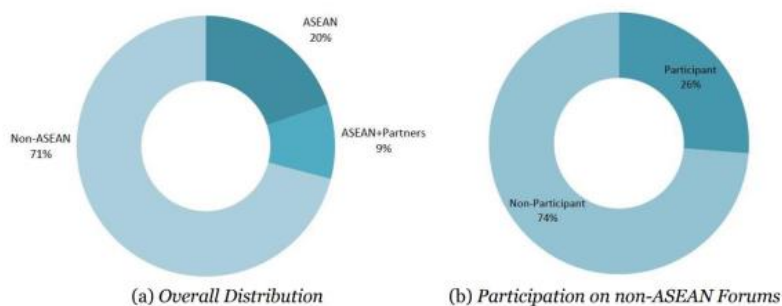
Melalui kebijakan luar negeri yang berorientasi pada ekonomi maritim, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi maritimnya untuk memperkuat kedudukan geopolitiknya di Lautan Hindia. Ini termasuk meningkatkan investasi dalam industri perikanan, pariwisata laut, dan transportasi maritim. Ini dapat membantu memperkuat kedudukan ekonomi Indonesia di wilayah tersebut dan meningkatkan stabilitas regional. Dibawah ini akan ditampilkan negara mitra diplomasi bilateral Indonesia sejak tahun 1998-2016 beserta kegiatan yang jenis kegiatan yang dilakukan.



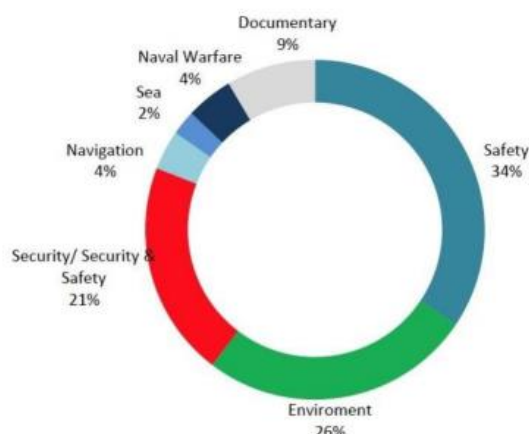
Kunjungan Angkatan Laut Bilateral, 1998-2016



Kegiatan Diplomasi Pertahanan Maritim Bersama, 1998-2016



Instrumen Hukum Internasional dan Konvensi Regional Terkait Persoalan Maritim



Simpulan

Mengintegrasikan kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional dengan potensi geografisnya untuk mencapai tujuan geopolitik di Lautan Hindia, Indonesia dapat mengambil beberapa langkah strategis: a. Pengembangan Diplomasi Maritim dan Ikut Serta Dalam Forum Regional. Diplomasi maritim melibatkan upaya diplomatik untuk membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara di sekitar Lautan Hindia baik secara bilateral maupun melalui forum multilateral seperti ASEAN atau Indian Ocean Rim Association (IORA). Selain itu, termasuk pertukaran kunjungan tingkat tinggi, dialog keamanan maritim, dan penandatanganan perjanjian kerja sama. Indonesia dapat menekankan pentingnya prinsip-prinsip keadilan maritim, kebebasan navigasi, dan keamanan laut dalam diplomasi ini. Ada beberapa komponen dari kerja sama bilateral diplomasi pertahanan ini yang terkait langsung dengan aspek maritim dan sebagian besar terfokus dengan beberapa negara tertentu dan cenderung berkisar pada kegiatan tertentu pula. b. Penegakan Hukum Maritim dan Kerja Sama Pertahanan Regional. Indonesia dapat memperkuat kerja sama pertahanan regional dengan negara-negara di sekitar Lautan Hindia. Ini meliputi menempatkan lebih banyak sumber daya untuk patroli laut, pengawasan udara, pertukaran informasi intelijen, pembangunan kapasitas pertahanan bersama, dan pelatihan bersama dalam penanggulangan kegiatan ilegal seperti pencurian ikan, perdagangan manusia, dan narkoba di perairan Lautan Hindia. c. Pemanfaatan Pulau-pulau Strategis. Indonesia dapat menggunakan pulau-pulau strategisnya di sekitar Lautan Hindia sebagai basis untuk kegiatan pertahanan dan pengawasan maritim. Pembangunan infrastruktur di pulau-pulau ini, termasuk pangkalan angkatan laut dan pos pengamatan, dapat meningkatkan kemampuan Indonesia untuk memantau dan merespons aktivitas yang mencurigakan di wilayahnya. Hal ini akan memungkinkan Indonesia untuk lebih efektif mengawasi dan mengamankan jalur pelayaran penting serta area strategis lainnya di Lautan Hindia. d. Promosi Kesejahteraan Ekonomi Maritim. Melalui kebijakan luar negeri yang berorientasi pada ekonomi maritim, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi maritimnya untuk memperkuat kedudukan geopolitiknya di Lautan Hindia. Ini termasuk meningkatkan investasi dalam industri perikanan, pariwisata laut, dan transportasi maritim. Ini dapat membantu memperkuat kedudukan ekonomi Indonesia di wilayah tersebut dan meningkatkan stabilitas regional.

Referensi

- Ayuningtyas, D. A. (2018). Kepentingan Indonesia Dalam Indian Ocean Rim Association (IORA) Tahun 2015. *EJournal Ilmu Hubungan Internasional*, 6(1), 1–014. <http://www.iora.net>
- Centre for Strategic and International Studies. 2016. “Diplomasi Pertahanan Maritim: Strategi, Tantangan, dan Prospek”.
- Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. “*BUKU PUTIH PERTAHANAN INDONESIA 2015*”. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- Manek, Bernadine Grace Alvania. 2023. “Strategi Pertahanan Udara Indonesia: Kasus Sengketa Laut Natuna Utara”. *Jurnal Lemhannas RI*. (Volume 11 No. 2). Hlmn 105–111.
- Media Indonesia. (2023). Kontribusi PDB Maritim Indonesia Baru 7%, Ekonomi Biru Perlu Dieksplorasi.
- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. (2024). Jakarta Geopolitical Forum 2024: Menko Luhut Tekankan Kolaborasi Internasional untuk Keamanan Maritim.
- Populis Journal. (2019). Strategi Indonesia Dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia di Tengah Kebijakan Jalur Sutra Maritim China. Diakses dari <https://journal.unas.ac.id>.
- Prakoso, L. Y., et al. (2024). *Geopolitik Dalam Konteks Keamanan Maritim*. Penerbit Widina Media Utama.
- Safira. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Geopolitik Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia*. Sovereign: Jurnal Hubungan Internasional.
- Setiawan, A, & Zaman, N.,A. 2020. Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Menjaga Kedaulatan Kepulauan Natuna 2014 – 2019. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta*.
- Suprianto, M. (2014). *Geostrategi Indonesia Dalam Dinamika Politik Global*. Jurnal Kajian Lemhannas RI.
- Yani, Y. M., & Montratama, I. (2018). *Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Suatu Tinjauan Geopolitik*. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 5(2), 29–45.
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., & Murod, M. (2022). Citizenship Education Perspective : Strengths , Weaknesses , And Paradigm of the Curriculum in 2022. *Proceedings of the 1st Pedagogika International Conference on Educational Innovation, PICEI 2022, 15 September 2022, Gorontalo, Indonesia*, 2. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2022.2335929>
- Santoso, G., Abdulkarim, A., Maftuh, B., Sapriya, & Murod, M. (2023). Kajian Identitas Nasional melalui Misi Bendera Merah Putih, dan bahasa Indonesia Abad 21. *Jurnal Pendidikan Transformatif (JPT)*, 2(1), 284–296. <https://jupetra.org/index.php/jpt/article/view/138>
- Santoso, G., Sabika, S., Kafia Elsaif, S., & Mukti Ardi, C. (2023). Telaah Implementasi Lagu Daerah dan Lagu Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Pendidikan Transformatif (Jupetra)*, 02(03), 95–107.
- Santoso, G., & Sari, P. K. (2019). *Proceedings of Educational Initiatives Research Colloquium 2019*.